

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan nasional suatu negara akan turut serta dalam aliansi dengan negara lain, salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama antar negara agar dapat mencapai kepentingan nasional negara masing - masing dan untuk menjamin agar tidak terjadinya negara-negara yang memiliki power besar (*great power*) yang akan mendominasi maupun menduduki posisi negara hegemoni, yang suatu saat akan dapat mendominasi dan mengintimidasi negara yang berkekuatan kecil seperti negara berkembang baik dari segi kedaulatan maupun militer negara agar keamanan negara menjadi salah satu nilai penting yang fundamental dalam hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah negara yang memiliki wilayah perairan sangat luas dengan kedaulatan yang sudah ada, di mana setiap negara memiliki batas wilayah negaranya masing masing dan hak-hak negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, untuk mencapai tujuan nasional sebagai negara kesatuan dengan tujuan nasional seperti yang sudah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mencapai dan mewujudkan sebagai negara maritim.

Dengan kondisi geografis yang strategis di antara negara di kawasan Asia Tenggara, untuk keamanan laut yang baik memerlukan sistem transportasi nasional

yang aman dan nyaman bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia, di mana saat ini Indonesia sebagai negara maritim dalam proses pembangunan negara dalam memperkuat pengaruhnya di masyarakat internasional dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, untuk tercapai target pembangunan maritim yang maksimal.

Maritime Safety atau keselamatan maritim merupakan suatu bagian yang saling berkaitan dan tumpang tindih dengan keamanan laut untuk memberikan perlindungan dan keselamatan yang layak baik itu keselamatan jiwa maupun barang atau benda untuk mengembangkan dan mengelola semua bentuk transportasi laut dalam mencapai keselamatan maritim tersebut. Di mana banyaknya lalu lintas kapal pelayaran yang keluar masuk di perairan Indonesia terutama di Kepulauan Riau khususnya pada wilayah kerja kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia, saat ini pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang sedang dilakukan dengan adanya Investasi dari dalam maupun investasi asing membentuk hubungan kerjasama antar dua negara yang bersifat bilateral dalam meningkatkan keselamatan berlayar.¹

Dulu untuk fungsi SBNP lebih kepada sebuah alat yang tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah dan membantu para nahkoda kapal agar berlayar dengan selamat sampai tempat yang dituju, akan tetapi pada kondisi saat ini untuk SBNP

¹ Muhammad Fadhil Arsy, *Kebijakan Maritim Dan Keamanan Transportasi Laut*, Volume 4. No. 1, 2021. Hal. 4.

sendiri terutama menara dan rambu suar selain sebagai sarana yang membantu dan mempermudah, juga sebagai tanda bagi suatu negara yang menunjukkan batas wilayah negaranya dengan batas negara lain dalam arti lain yaitu sebuah eksistensi negara yang bersangkutan, dengan adanya kepentingan navigasi pelayaran ini akan dapat mencapai kepentingan bersama maupun kepentingan negara masing-masing.

Keselamatan maritim merupakan sebuah posisi sentral dan di anggap sangat penting dalam dunia pelayaran, terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh karena faktor alam maupun kelalaian atau *human error* akan menyebabkan kerugian baik itu dari segi materi, medis, nyawa maupun berdampak pada lingkungan seperti banyak kasus yang sudah terjadi sebelumnya, dimana untuk kasus kecelakaan kapal di Indonesia masih meningkat dari tahun sebelumnya yang memerlukan tindakan maupun solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 sarana transportasi laut yang merupakan suatu alat transportasi yang strategis bagi kepentingan nasional Indonesia dalam menunjang akses perekonomian masyarakat yang termasuk suatu sarana vital yang akan menunjang peningkatan tujuan nasional negara sebagai negara maritim, yang berisikan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di

perairan, pelabuhan, dan lingkungan maritim.² Menurut Ditjen Hubla Sejak tahun 2011 sampai saat ini terjadi fluktuasi kecelakaan kapal di perairan Indonesia, rata-rata adanya penurunan jumlah kecelakaan kapal sebesar 6,95 %, tapi di sisi lain untuk jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari kecelakaan itu juga meningkat sekitar 46,71% pertahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013, bahwa kecelakaan kapal di Indonesia terbagi menjadi kapal terbakar, kapal tenggelam, kapal tubrukan, dan kandas berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi , di mana berdasarkan data yang dikumpulkan telah terjadi kecelakaan kapal pelayaran sebanyak 129 kasus dari tahun 2017-2021, dari kasus kecelakaan tersebut terlihat masih tingginya angka kecelakaan kapal di Indonesia. Berikut adalah data yang menunjukkan masih tingginya angka kecelakaan kapal yang terjadi:

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Pelayaran Berdasarkan Jenis Kecelakaan 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tenggelam	6	10	6	3	5	30
2.	Terbakar/meledak	14	12	6	2	6	40
3.	Tubrukan	6	3	9	2	4	24
4.	Kandas	6	7	0	4	2	19
5.	Lain-lain	2	7	4	1	2	16

² Muh Kadarisman, *Maritime Safety And Safety Policy In Supporting The Sea Transportation System*, Vol. 04 No. 02. 2017. Hal. 6.

Total	34	39	25	12	19	129
-------	----	----	----	----	----	-----

Sumber: KNKT, 2021.³

Karena masih banyaknya terjadi kecelakaan kapal yang ada di Indonesia memerlukan adanya tindakan yang dapat mengatasi masalah tersebut, SBNP adalah alat atau perlengkapan yang berada diluar kapal yang dioperasikan dalam menjaga keselamatan pelayaran, membantu dan mengarahkan para nakhoda kapal untuk berlayar sampai tujuan, baik itu berupa menara suar, rambu suar, dan pelampung suar serta SBNP lainnya. Hubungan bilateral antara Indonesia-Korea Selatan sudah berjalan sejak tahun 1966. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia- Korea Selatan melalui *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) dalam pembangunan SBNP di Indonesia sudah terjalin dari awal tahun 2022 dengan target selesai 2 tahun. Indonesia sebagai negara yang dalam proses pengembangan keselamatan dan pertahanan maritimnya memerlukan upaya dalam bentuk kerjasama negara dengan negara yang lain.⁴

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) merupakan suatu lembaga yang dibuat dan didanai oleh pemerintah Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 1987 dengan tujuan untuk membantu dalam memberikan kontribusi pada stabilitas

³ KNKT, 2021, *Buku Statistik Invesigasi Kecelakaan Transportasi*, Hal. 23.

⁴Fariz al-fadhat, "kerjasama prtahanan Indonesia-Korea Selatan: kedaulatan maritim dan transfer teknologi dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400" *Jurnal Hubungan Intrnasional*, Vol.25, No.3. 2019. Hal. 5.

pembangunan dan perekonomian negara yang masih berkembang dalam meningkatkan hubungan kerjasama yang dilakukan, dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan sendiri sudah berjalan cukup lama.

Di mana kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI, yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan melalui EDCF, dalam menjalankan program pembangunan SBNP di perairan Indonesia, kontrak kerjasama telah ditandatangani oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan konsorsium ANSE Technologies. Pembangunan SBNP tersebut terdiri dari pembangunan menara suar 8 unit dan rambu suar sebanyak 95 unit yang tersebar di seluruh Distrik Navigasi yang ada di Indonesia, terutama pada wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang yang merupakan sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari lautan, yaitu 417.013 Km² dengan luas wilayah daratan 10.594 Km², adapun kerjasama tersebut yang pelaksanaan pekerjaannya dijalankan dari tahun 2022 sampai dengan 2024.⁵

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menyambut baik adanya kerjasama tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan keandalan SBNP, adapun kerjasama pembangunan bilateral Indonesia-Korea selatan ditetapkan dalam *Joint Declaration* yang terbagi menjadi tiga bidang yaitu: 1) Kerjasama dalam politik dan keamanan. 2) Kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan. 3) Kerjasama bidang

⁵ Dephub , <http://hubla.dephub.go.id/home/post/.read/10963/indonesia-korea-selatan-kerja-sama-bangun-menara-suar-dan-rambu-suar> , Diakses September 2022.

sosial budaya. Saat ini salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, serta dapat menjaga komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan penggantian menara suar dan rambu suar di 20 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, yang tersebar di 103 lokasi yang tujuannya untuk mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembangunan SBNP di Indonesia, dalam membantu pembangunan SBNP, dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia dalam menunjang sistem transportasi laut yang aman di Indonesia. Berdasarkan data kecelakaan kapal yang terjadi sistem keselamatan dan keamanan transportasi laut di Indonesia belum berjalan optimal, hal tersebut terjadi karena masih sering terjadi dan masih tingginya angka kecelakaan kapal baik karena faktor alam maupun karena faktor manusia seperti yang telah dipaparkan dalam data kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi, hal tersebut menyebabkan perlunya perbaikan SBNP di perairan Indonesia agar kapal kapal yang masuk perairan Indonesia lebih terjamin keselamatannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, keselamatan pelayaran Indonesia masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah struktural maupun masalah lain, perlu adanya upaya secara nasional tentang betapa pentingnya keselamatan maritim, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya angka kecelakaan kapal dan SBNP yang kurang berfungsi maksimal yang memerlukan

perbaikan, yang diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kapal, salah satunya saat ini adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan melalui EDCF, dari kerjasama ini tentu Indonesia sebagai negara yang menerima bantuan akan mendapatkan manfaat, baik itu berupa dana yang diberikan yang akan membantu pembangunan dan perbaikan SBNP di Indonesia yang rusak maupun yang tidak berfungsi, dengan perbaikan SBNP ini diharapkan dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan dari kecelakaan kapal yang terjadi sehingga alur pelayaran laut Indonesia dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan Kedutaan Republik Korea untuk Republik Indonesia, Korea Selatan telah membantu 21 proyek yang ada di Indonesia melalaui EDCF yang mencapai 699 US Dollar dari Korea, sebelumnya Indonesia telah bekerjasama dengan Korea Selatan melalui EDCF yaitu dalam pembangunan bendungan Karian di Banten pada tahun 2016, dalam proyek pembangunan bendungan Karian-Serpong tersebut 51% pendanaan berasal dari negara Korea Selatan melalui EDCF dan 45% dari Indonesia dengan anggaran dana senilai 1.070 Triliun dengan melibatkan 6 perusahaan dalam pembangunan bendungan tersebut yang berlangsung selama 48 bulan.⁶ Akan tetapi dari bantuan Korea Selatan ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk meneliti **“Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pembangunan SBNP Melalui EDCF Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran Di Kepulauan Riau”**

⁶ Ketut Ardani, *Pinjaman Luar Negeri Korea Selatan Kepada Indonesia Dalam Pembangunan Bendungan Karian Di Banten Melalui Economic Development Cooperation Fund Tahun 2016*, eJurnal Jurnal Hubungan Internasional, Vol 7, No.4, 2019. Hal. 11.

mengenai kerjasama pembangunan SBNP Indonesia-Korea Selatan dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Indonesia terkhususnya yaitu pada keselamatan pelayaran d wilayah kerja Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah penelian yaitu: bagaimana kerjasama pembangunan SBNP Indonesia-Korea Selatan dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk menganalisa kerjasama pembangunan SBNP Indonesia-Korea Selatan dalam membantu pembangunan SBNP, dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di Indonesia sesuai dengan standar peralatan keselamatan kerja sesuai dengan SOLAS 1974.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Secara Teoritis, penulis berharap dengan tulisan ini akan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan kepada pembaca terutama pada masyarakat tentang bagaimana pentingnya SBNP dalam membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berlayar.

- b) Dari hasil penelitian yang dibuat ini penulis berharap adanya penelitian berikutnya yang dapat dijadikan bahan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan mendalam.
- c) Terutama untuk penulis, penelitian ini sebagai wadah dalam menambah wawasan berupa ilmu yang telah didapatkan dan sarana aplikasi dari ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan terkait dengan bidang ilmu yang dipelajari khususnya yang berkaitan dalam hubungan dan kerjasama internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional dalam mengetahui sejauh mana kepentingan dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan tersebut dalam meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia.